Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif dalam Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Fadiatul Arifah

diaf_rifa84@yahoo.co.id | *UIN Sunan Ampel*
Jl.A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: Health is a basic right of the people of Indonesia, as stated in Article 28 (h) of the 1945 Constitution. In practice, efforts to improve the well-being in the health sector are not only exercised in modern ways but also with alternative medicine efforts, by using various kinds of unconventional treatment, both medical and treatment products. This paper aims to find out the pattern of legal relations between the parties in the operation of alternative medical clinics without permission. it is found that the establishment of illegal clinics is against the law No. 8 of 1999, thus subject to administrative sanctions in the form of payment up to Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Furthermore, the trade law has occurred since the consumer decides to seek alternative treatment so that both parties must exercise their respective rights and obligations. It is suggested that consumers should be vigilant in consulting alternative medicine, and it would be better for the Health administrator to conduct surveillance on alternative medicine businesses.

Key Word: Alternative Treatment, Legal Permission of Clinic, Law Of Consumer.

Abstrak: Kesehatan merupakan hak dasar rakyat Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 28 (h) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28. Dalam praktiknya, upaya meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan tidak hanya dengan cara-cara modern, namun juga dengan upaya pengobatan alternatif, yang merupakan “berbagai macam pengobatan, baik praktik maupun produk pengobatan yang bukan bagian pengobatan konvensional”. Tulisan ini bertujuan mengetahui “pola hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan klinik pengobatan alternatif tanpa izin” Ternyata temuan tulisan ini adalah bahwa penyelenggaraan klinik pengobatan alternatif tanpa izin telah melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999, sehingga terkena sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah). Selanjutnya, hukum perikatan telah terjadi sejak konsumen memutuskan untuk berobat ke pengobatan alternatif tersebut, sehingga kedua pihak harus melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu diajukan saran bahwa konsumen harus berhati-hati dalam melakukan pengobatan alternatif, dan sebaiknya bagi Dinas Kesehatan perlu diadakan upaya pengawasan kepada pelaku usaha pengobatan alternatif.

Kata kunci: Pengobatan alternative, Ijin penyelenggaraan klinik, hokum perlindungan konsumen.

Pendahuluan

Kejahatan yang ada di dunia ini merupakan akibat dari berbagai perbuatan manusia. Padahal setiap kehidupan manusia menghendaki adanya ketentraman, ketertiban, kedamaian dan keadilan. Kesemuanya itu selalu bertentangan dengan kejahatan. Perbuatan kejahatan dijadikan sebagai peristiwa pidana karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan melanggar kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kondisi aman dan tertib.¹

Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindak pidana disebut sebagai *jarīmah*. Fakta yang ada bahwa tidak semua tindak pidana (*jarīmah*) diancam dengan *ḥudud* (jama' dari had) atau *qīṣaṣ* / *diyat*. Akan tetapi pada umumnya tindakan pidana diancam dengan *ta'zīr*. *Jarimah* (tindak pidana) adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang terancam dengan hukuman had atau *ta'zīr*.²

Maksud pokok dari hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan untuk menjaga manusia dari hal-hal yang mafsadah (merusak dan merugikan), karena perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam.³

¹ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 2.

² Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

³ Pada dasarnya penjatuhan hukuman merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Lihat: Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam

Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu manusia dalam menjaga masyarakat dan tertib sosial. Setiap tindakan kejahatan yang ada di muka bumi akan membawa pengaruh buruk.⁴ Dengan kata lain, kejahatan akan membawa *mudarat* kepada manusia dan setiap kejahatan akan membawa dampak yang negatif bagi kehidupan, baik dari sendiri maupun orang lain.⁵

Setiap hukuman yang ada harus mempunyai dasar, baik itu berasal dari al-Qur'an dan hadis. Atau, berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan hukuman yang ada untuk kasus *ta'zīr*. Hukuman tersebut harus bersifat pribadi dengan maksud bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan saja. di samping itu, hukuman tersebut bersifat umum, yang artinya berlaku bagi semua orang. Pada hakikatnya manusia sama di hadapan hukum.⁶

Sementara pihak atau lembaga yang melakukan hukuman dan sanksi adalah petugas yang ditunjuk oleh imam (pemimpin negara) untuk melaksanakan hal tersebut, dan hukumannya disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan.

Disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 (h) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut mengatur secara jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Upaya memenuhi dan memajukan tingkat kesehatan dilakukan dengan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dan merata. Artinya tersedia dan

Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015): 313.

⁴ Mubarak, *Kriminologi dalam Prespektif Islam*, 2.

⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 13.

⁶ Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 314.

semakin meningkatnya fasilitas kesehatan termasuk obat serta kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses semua itu.⁷

Sedangkan definisi kesehatan secara yuridis terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1, bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga kesejahteraan umum tersebut dapat tercapai.⁸

Usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang jasmani dan rohani salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan yang memadai, modern dan terjangkau masyarakat. Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang modern tersebut sudah mulai diselenggarakan oleh pemerintah, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok daerah dengan berbagai cara. Misalnya mendatangkan alat-alat modern dari luar negeri atau mendatangkan para ahli di bidang kesehatan, dalam teori maupun prakteknya dan sebagainya, agar terjadi kemajuan di bidang kesehatan.⁹

Di sisi lain, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw., bukan saja memberi petunjuk tentang pri-kehidupan dan tata cara ibadah kepada Allah secara khusus yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat saja. akan tetapi juga memberikan banyak petunjuk praktis dan formula-formula umum yang dapat digunakan untuk menjaga keselamatan lahir dan batin. Termasuk yang berkaitan dengan terapi atau pengobatan.¹⁰

Dalam praktiknya, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan tidak hanya dilakukan dengan cara-cara modern dalam penyelenggaraan

⁷ Ubaidillah Kamal, "Konstruksi Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Kasus di Kota Semarang)," *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (November 2017): 70.

⁸ Lihat lebih lanjut dalam *UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*

⁹ Kamal, "Konstruksi Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Kasus di Kota Semarang)," 71.

¹⁰ Syamsuri Ali, "Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah* XII, no. 4 (Desember 2015): 868.

kesehatan. Namun pada kenyataannya ada jenis usaha untuk mencapai kesehatan yang masih diminati oleh masyarakat. Yaitu usaha pengobatan alternatif. Pengobatan seperti ini terdapat hampir di seluruh Indonesia dari kota sampai pelosok tanah air. Hal ini tak lepas bahwa kebutuhan akan kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara. Tak pelak masyarakat dari golongan apapun, baik dari strata kelas atas sampai bawah, membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai.¹¹

Klinik pengobatan alternatif dalam penyelenggaraannya harus tetap memperhatikan upaya pengobatan yang aman, terjangkau, serta berhasil guna. Jenis pengobatan alternatif yang diminati dan sering banyak dijumpai masyarakat pada umumnya adalah pengobatan pijat urat, patah tulang, tusuk jarum, pemberian ramuan. Namun sekarang ada jenis pengobatan alternatif yang baru yaitu pengobatan alternatif yang berani melakukan pembedahan fisik.

Hasil yang dicapai dari pengobatan alternatif ini ada yang positif dan ada yang negatif. Tindakan pengobatan alternatif yang positif yaitu kesembuhan bagi pengguna jasa pengobatan alternatif. Sedangkan yang negatif bisa disebabkan karena kondisi pasien yang memang sudah kritis atau karena kesalahan dari pelaku usaha pengobatan alternatif tersebut. Kesalahan disini bisa karena kesengajaan, kelalaian atau kurang kehati-hatian.¹²

Melihat permasalahan di atas ternyata paling sedikit ada dua pihak yang berperan, yaitu pelaku usaha pengobatan alternatif dan konsumen. Hal ini juga ditegaskan oleh Az. Nasution, bahwa "Berkaitan dengan obyek barang

¹¹ Indra Rahmatullah, "Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Pengobatan Alternatif dan Tradisional," *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 1, no. 2 (2014): 196.

¹² Sehingga tak salah jika dikatakan bahwa berkembangnya pengobatan alternatif belum sepenuhnya dilakukan penataan secara menyeluruh, sehingga pelayanan pengobatan tradisional masih kurang terjamin dan mengandalkan pengobatan yang apa adanya. Lihat: Lavenia Rarung, "Tanggungjawab Hukum terhadap Pelaku Pembuat Obat-obatan Tradisional Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," *Lex Crimen* VI, no. 3 (Mei 2017): 103.

atau jasa, setidaknya ada dua pihak yang saling berhubungan atau bermasalah yaitu pertama. Pihak penyedia barang atau jasa kedua, pihak pemakai atau pengguna barang atau jasa tersebut". Penyedia barang atau jasa disebut pelaku usaha pemakai atau pengguna disebut konsumen.¹³

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Dengan begitu pasien dalam kasus pengobatan alternatif tersebut di atas dapat digolongkan sebagai konsumen, karena ia sebagai pengguna jasa pengobatan alternatif.¹⁴

Sedangkan pihak penyedia jasa pengobatan alternatif tersebut dapat disebut sebagai pelaku usaha, karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi."

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus tentang hak-hak seorang konsumen. Tepatnya pada pasal 4 huruf a bahwa:

¹³ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 53.

¹⁴ Akan tetapi yang perlu diperhatikan, bahwa perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor social, seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status social dari konsumen tersebut. Kelompok ini sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, sehingga pemasar harus sangat memperhatikan faktor kelompok dalam menyusun strategi pemasaran. Lihat: Sri Wigati, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Maliyah* 1, no. 1 (Juni 2011): 28.

“konsumen mempunyai hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa”.

Apalagi dalam pengamatan bisa dikatakan bahwa ada peningkatan kecenderungan penggunaan obat-obat herbal dan terapi alternatif dewasa ini. Media massa berperan cukup besar dalam kegiatan promosi obat-obat herbal dan terapi alternatif lainnya.¹⁵

Dalam konteks inilah naskah ini hadir. Yaitu untuk menjawab pertanyaan: “bagaimana pola hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan klinik pengobatan alternatif tanpa izin?”

Pola Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Praktek Pengobatan Alternatif

Karakteristik Pengobatan Alternatif

Istilah pengobatan alternatif seolah menjadi perbendaharaan baru yang mulai marak digunakan dalam dunia pengobatan. Disebut alternatif karena jenis, teknik, atau metode pengobatannya berbeda dengan pengobatan biasa lebih banyak mengacu pada cara-cara medis.¹⁶

Sedangkan definisi dari pengobatan alternatif, yang dikatakan sebagai *Complementary and Alternatif Medicine (CAM)* oleh National Center of Complementary and Alternatif Medicine, merupakan: “sebagai berbagai macam pengobatan, baik praktik maupun produk pengobatan yang bukan merupakan bagian pengobatan konvensional.¹⁷

Pengobatan alternatif bisa berupa jamu atau ramuan tradisional maupun teknik-teknik pengobatan tertentu. Baik yang bersumber dari ilmu lokal maupun luar negeri. Dalam kategori pengobatan tradisional, menurut departemen kesehatan, sementara jenis pengobatan tradisional lainnya adalah terapi berdasarkan keterampilan (akupunktur, pijat

¹⁵ Darma Satria, “Complementary and Alternative Medicine (CAM): Fakta Atau Janji,” *Idea Nursing Journal* IV, no. vol. 3 (2013): 82.

¹⁶ Rahmatullah, “Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Pengobatan Alternatif dan Tradisional,” 196.

¹⁷ Satria, “Complementary and Alternative Medicine (CAM): Fakta Atau Janji,” 87.

refleksi, dan sebagainya), ramuan, (gurah, ular kobra, obat dari tabib atau sinshe), agama, dan supranatural (prana, paranormal, rieky, dan lain-lain).

Sedangkan beberapa ciri khas dari pengobatan alternatif, yaitu :

1. Pengobatan alternatif masih menggunakan cara-cara dan penyembuhan tradisional. Misalnya: memijat, mengurut, penyaluran tenaga dalam, tusuk jarum, menggunakan cara supra natural, dan ramuan, dan jamu.
2. Pengobatan alternatif tidak menggunakan alat-alat medik yang dipakai dalam dunia kesehatan.
3. Pada umumnya pelaku usaha pengobatan alternatif tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Tetapi ada juga yang melalui jalur pendidikan dengan penyembuhan yang berdasarkan keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural yang pada umumnya diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Adapun perbandingan pengobatan alternatif dengan pengobatan medis yaitu :

1. Bahwa pengobatan alternatif dilakukan dengan cara dan menggunakan Alat-alat tradisional. Sedangkan pengobatan medis dilakukan dengan cara dan menggunakan alat-alat modern.
2. Bahwa pengobatan alternatif dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Sedangkan pengobatan medis dilakukan oleh tenaga medis yaitu : dokter dengan melalui pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Pada dasarnya, praktik pelayanan pengobatan alternatif dewasa ini sebenarnya bertujuan untuk menunjang terselenggaranya kesejahteraan di bidang kesehatan yang selaras dengan tujuan dasar Negara

Republik Indonesia.¹⁸ Hal ini tak lepas dari devinisi pelayanan kesehatan (*health care service*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat keseluruhan. Tegasnya bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama sama dalam satu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat.¹⁹

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan tidak ditemukan rumusan pengertian mengenai pelayanan kesehatan. Di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 hanya dirumuskan mengenai upaya kesehatan, bahwa: “upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”

Adapun yang berhubungan dengan pengobatan alternatif terdapat dalam pasal 1 ayat 7 undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Di dalamnya disebutkan bahwa: “Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya, yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat”.

Kemudian di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dirumuskan bahwa: “Untuk mewujudkan derajat masyarakat yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pencegahan kesehatan (*rehabilitatif*)

¹⁸ Rarung, “Tanggungjawab Hukum terhadap Pelaku Pembuat Obat-obatan Tradisional Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” 103.

¹⁹ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* (Yogyakarta: Universitas Gadjahmada, 1997), 146.

yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan”.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, mengatur ketentuan mengenai tenaga kesehatan, yaitu :

Pasal 1 ayat (1), menyatakan: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Pasal 3 menyatakan: “Tenaga kesehatan wajib memiliki, pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijasah dari lembaga pendidikan”.

Pasal 4 ayat (1): “Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki izin dari Menteri”. Ayat (2) dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana di maksud dalam ayat (1) bagi tenaga kesehatan masyarakat. Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Sementara itu, Keputusan Menkes RI No 1076/Menkes/SK/VII/2003 mengatur tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Di dalam peraturan tersebut diuraikan cara-cara mendapatkan izin praktek pengobatan tradisional beserta syarat- syaratnya. Khusus untuk obat herbal, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menkes RI Nomor 121 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal.²⁰

Adapun syarat-syarat pendaftaran izin pengobatan alternatif, yaitu:²¹

1. Surat permohonan dari pemilik pengobatan alternatif disertai dengan foto copy KTP dan materai Rp. 6000,-

²⁰ Kamal, “Konstruksi Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Kasus di Kota Semarang),” 77.

²¹ Keputusan Menti Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 1076/MENKES/SK/VII/2003 Pasal, 5 dan 11.

2. Berbentuk badan hukum / usah perorangan;
3. Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan tempat usaha didirikan;
4. Foto copy izin HO dari pemerintah kota Surabaya;
5. Status kepemilikan tanah / bangunan;
6. Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab disertai foto copy KTP, surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT), surat izin pengobatan tradisional untuk akupuntur (SIPT).
7. Surat pernyataan sebagai penanggung jawab disertai materai Rp. 6000,-.
8. Surat bersedia menaati peraturan yang berlaku disertai materai Rp. 6000,-.
9. Mempunyai tenaga pengobat tradisional yang memiliki STPT atau SIPT lebih dari 2 orang ;
10. Surat pernyataan bersedia sebagai pengobat tradisional
11. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang tradisional;
12. Rekomendasi dari kejaksaan setempat untuk pengobatan tradisional yang supernatural dan kantor departemen agama untuk dengan cara pendekatan secara agama.
13. Daftar tarif pengobatan;
14. Daftar ketenagaan;
15. Daftar pelayanan pengobatan;
16. Daftar peralatan;
17. Peta lokasi dan denah bangunan;
18. Surat keterangan berbadan usaha dari dokter;
19. Membuat papan nama sesuai peraturan yang berlaku;
20. Daftar bahan obat yang digunakan;

Dasar Keterikatan Pelaku Usaha Pengobatan Alternatif Terhadap Konsumen

Pengertian hukum perikatan yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat

hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian atau suatu peristiwa hukum lain yang mengakibatkan perikatan. Bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu, yaitu antara kreditur dan debitur. Dalam hal ini yang menjadi subyek perikatan ialah pelaku usaha pengobatan alternatif dan konsumen.²²

Sedangkan perikatan menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum. Yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh undang-undang apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.²³

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antar dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan atau suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju dalam melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan adalah sama artinya. Perkataan kontrak

²² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2004), 1.

²³ Subekti, 2.

lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.²⁴

Perjanjian-perjanjian yang lahir dari buku III BW pada umumnya merupakan perjanjian obligator (*consensual-obligator*). Artinya perjanjian itu pada dasarnya melahirkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak yang membuatnya (*personlijk recht*). Salah satu ciri dari hak perseorangan (*personlijk recht*) adalah sifatnya yang relatif atau nisbi, artinya hak perorangan itu hanya mengikat pada pihak yang membuat perjanjian itu sendiri (*pacta sunt servando*).²⁵

Hal ini dapat disimak dari ketentuan pasal 1315 jo pasal 1340 BW. Dalam pasal 1315 BW dinyatakan bahwa, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau minta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Lebih lanjut pasal 1340 BW menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya”.

Sedangkan obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi. Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 BW). Perikatan untuk memberi ialah kewajiban seseorang untuk memberi sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu.²⁶

Memberi sesuatu dapat diartikan dengan menyerahkan sesuatu baik penyerahan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Perikatan untuk berbuat sesuatu yaitu prestasinya berwujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan yaitu yang negatif.²⁷

Hubungan antara pelaku usaha pengobatan alternatif dan konsumen merupakan suatu perjanjian yang obyeknya

²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 195.

²⁵ Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016), 40.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 3.

²⁷ Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 40.

berupa layanan kesehatan dan upaya penyembuhan. Dalam perjanjian tersebut muncul suatu perikatan. Dalam perjanjian ini dua pihak, yaitu pelaku usaha pengobatan alternatif dan pasien (konsumen). Masing-masing sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dalam pasal 1233 BW disebutkan, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang". Artinya bahwa dalam perjanjian antara pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen menimbulkan suatu perikatan.

Sehubungan dengan itu, pasal 1320 BW menyatakan hal-hal tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan menurut undang-undang.²⁸

Pengertian dari kesepakatan pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen, yaitu konsumen bersedia menerima upaya penyembuhan yang diberikan oleh pengusaha pengobatan alternatif, sedangkan pelaku usaha pengobatan alternatif berjanji untuk memberikan kesembuhan dalam pelayanan kesehatannya kepada konsumen.

Pengertian dari kecakapan untuk membuat suatu perikatan pengobatan alternatif dengan konsumen, yaitu pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa. Artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 BW dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah: orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur, dan orang yang kehilangan akal sehatnya (gila). Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam pasal 47 ayat 1: anak yang belum mencapai umur 18

²⁸ Mubarak, 41.

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ayat 2 menyatakan: orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Sedangkan dalam pasal 50 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.²⁹ Dalam hal ini konsumen dalam melakukan persetujuan kepada pengusaha pengobatan alternatif harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

Pengertian dari suatu hal tertentu, bahwa di sini meliputi pemberian pelayanan kesehatan dan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen.

Pengertian dari sebab yang diperbolehkan di sini adalah keinginan konsumen agar dapat sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu, hubungan antara pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen dalam perjanjian harus mempunyai sebab yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau tidak ada sebab yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam perjanjian, maka perjanjian dapat dikatakan batal.³⁰

Adapun dalam pasal 1338 BW, menyatakan tentang akibat-akibat persetujuan bahwa: "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".³¹ Artinya bahwa pelaku usaha pengobatan alternatif dalam melakukan persetujuan kepada konsumen telah disepakati bahwa pelaku usaha pengobatan alternatif berjanji untuk memberikan kesembuhan bagi konsumen. Bahwa janji pelaku usaha pengobatan alternatif

²⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 47 jo pasal 50.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 6.

³¹ Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 41.

merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Apabila janji tersebut tidak ditepati oleh pelaku usaha pengobatan alternatif atas penyembuhan konsumen, maka pihak konsumen dapat menuntut adanya kerugian dari janji pelaku usaha pengobatan alternatif tersebut.

Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Atau, karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Artinya bahwa, kedua belah pihak harus saling memenuhi apa yang dijanjikan. Dalam hal ini pelaku usaha pengobatan alternatif harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, yaitu untuk memberikan penyembuhan kepada konsumen. Begitu pula konsumen.

Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Artinya adalah dalam persetujuan pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen harus mencakup unsur itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, dengan kata lain kita harus menafsirkan perjanjian berdasarkan keadilan dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatuhan ikut pula menentukan isi perjanjian.³²

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Praktek Pengobatan Alternatif

Hubungan pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen akan berjalan dengan baik, jika kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Karena hak dan kewajiban merupakan suatu unsur terpenting.³³

Dalam Undang-undang Perlindungan Kosumen No. 8 tahun 1999, diatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Disebutkan dalam pasal 4 bahwa hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai

³² Mubarak, 41.

³³ Wigati, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam," 28.

- dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha pengobatan alternatif, yaitu:

1. Konsumen tidak mendapatkan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengobatan alternatif, sehingga konsumen mengalami kerugian.
2. Bahwa konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar dari pelaku usaha pengobatan alternatif, terutama sebelum operasi dilakukan, pelaku usaha pengobatan alternatif tidak memberi tahu akan resiko yang akan ditimbulkan dari penyembuhan tersebut.
3. Pelaku usaha pengobatan alternatif mengabaikan keluhan dari konsumen, akibat kerugian yang dideritanya.

Di sebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban-kewajiban konsumen adalah

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 juga diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa hak-hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, yaitu:

6. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
7. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
8. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
9. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
10. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

- memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
11. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 12. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang tidak diberikan kepada konsumen, yaitu:

1. Dalam hal ini pelaku usaha pengobatan alternatif tidak memberikan informasi yang benar, terutama pada penjelasan kepada konsumen akan dampak yang di timbulkan setelah penyembuhan.
2. Dalam hal ini pelaku usaha pengobatan alternatif tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya dalam upaya penyembuhan.

Sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Di samping itu pelaku usaha juga telah melanggar ketentuan dalam undang-undang yang mana pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya di Dinas Kesehatan. Jika demikian, maka pelaku usaha bisa dikenakan hukuman penjara dan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Analisis Terhadap Pola Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif Tanpa Izin

Praktek pengobatan alternatif yakni menggunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan tertentu dalam pengobatan dan merawat pasien sebagai konsumen. Pada dasarnya praktek ini bukanlah perbuatan yang dilarang. Bahkan boleh dibilang merupakan profesi amat mulia dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang perekonomiannya minim. Tetapi sebagai suatu profesi, pengobatan alternatif harus dilakukan oleh orang yang berkualifikasi ahli.

Namun dalam kasus penyelenggaraan klinik pengobatan alternatif yang berpraktek tanpa izin, memang tidak mustahil masih juga banyak yang sembuh. Akan tapi ada juga yang membawa akibat tertentu pada pasien atau konsumen yang ditanganinya, seperti cacat atau bahkan mati.

Sedangkan dalam hukum perikatan telah dijelaskan bahwa hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi, dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.³⁴

Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Dan biasanya yang disebut perikatan adalah suatu hubungan hukum, sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dapat dinilai dengan uang.

Dalam tulisan ini dapat dikatakan bahwa perikatan tersebut terjadi sebab ada 2 (dua) orang yang sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Bentuknya pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya menghasilkan uang sebagai ganti jasa dan konsumen berhak mendapatkan pelayanan. Hubungan antara pelaku usaha pengobatan alternatif dan konsumen merupakan suatu perjanjian yang mana obyeknya berupa layanan kesehatan dan upaya penyembuhan. Seperti dalam pasal 1233 BW disebut, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang". Artinya bahwa dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen menimbulkan suatu perikatan.³⁵

³⁴ Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, 196.

³⁵ Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 42.

Adapun syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam pasal 1320 BW, yaitu:³⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cukup untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Jadi pelaku usaha harus beritikad baik, begitu pula konsumen. Adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu sejak konsumen memutuskan untuk berobat ke pelaku usaha.

Dalam tulisan yang sedang dibahas ini pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya sebagai penyedia jasa dan pelaku usaha tidak mendapatkan ijin praktek klinik dari Dinas Kesehatan. Tentunya dengan hal ini pelaku usaha sudah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1996. Tepatnya pada pasal 58 ayat (1) dan pasal 59 (1), dimana sanksi dari kedua pasal tersebut terdapat dalam pasal 84 ayat (5): yaitu “menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 26 dijelaskan bahwa: “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”. Apabila pasal tersebut dilanggar maka sanksi yang harus ditanggung terdapat dalam pasal 60 ayat (2), yaitu: “sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta)”.

³⁶ Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, 205.

Maka dalam kasus tulisan yang sedang dibahas ini bisa disimpulkan bahwa pelaku usaha mendapat ancaman berlapis. Jelasnya ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena menimbulkan cacat bagi konsumen.

Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas maka bisa disimpulkan, bahwa: “hubungan hukum pelaku usaha pengobatan alternatif dengan konsumen, bahwa hubungan hukum itu terjadi sejak konsumen memutuskan untuk berobat kepada pelaku usaha dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut maka hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan suatu perikatan yang obyeknya adalah berupa penyembuhan dan pelayanan kesehatan yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.”

Selanjutnya diajukan saran bahwa:

1. Pengobatan alternatif dalam prakteknya harus mempunyai izin dari dinas kesehatan.
2. Dalam proses penyembuhan melalui pengobatan alternatif, hendaknya konsumen berhati-hati dalam memilih pengobatan alternatif, apakah pelaku usaha tersebut sudah memenuhi standart dan mendapatkan izin dari dinas kesehatan dalam praktek penyembuhannya.
3. Sebaiknya bagi Dinas Kesehatan perlu diadakan upaya pengawasan kepada pelaku usaha pengobatan alternatif yang telah mendapatkan izin secara bergantian dan teratur, dan mencabut izin praktek yang tidak melalui prosedur dinas kesehatan, supaya di dalam suatu pengobatan itu dapat diketahui apakah pengobatan alternatif itu layak untuk melakukan praktek pengobatan atau tidak.

Daftar Pustaka

- Ali, Syamsuri. "Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* XII, no. 4 (Desember 2015).
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kamal, Ubaidillah. "Konstruksi Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Kasus di Kota Semarang)." *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (November 2017).
- Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Yogyakarta: Universitas Gadjahmada, 1997.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Diktat Hukum Dagang*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016.
- . *Kriminologi dalam Prespektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015).
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Rahmatullah, Indra. "Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Pengobatan Alternatif dan Tradisional." *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 1, no. 2 (2014).
- Rarung, Lavenia. "Tanggungjawab Hukum terhadap Pelaku Pembuat Obat-obatan Tradisional Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan." *Lex Crimen* VI, no. 3 (Mei 2017).
- Satria, Darma. "Complementary and Alternative Medicine (CAM): Fakta Atau Janji." *Idea Nursing Journal* IV, no. vol. 3 (2013).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Wigati, Sri. "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Maliyah* 1, no. 1 (Juni 2011).